

Better Policies Better Lives™

CERITA PERUBAHAN

Meningkatkan Produksi Pengetahuan (2013–2022)



Daftar Isi

Daftar Isi	i
Daftar Singkatan	ii
Pengantar	iv
Mendorong Perubahan	v
Bagian 1. Insentif Riset bagi Ekosistem Pengetahuan	2
Mengurai Determinan Riset Berkualitas	4
Mendorong Insentif Tepat Guna.....	6
Mengadaptasi Dinamika Kepentingan	8
Memperluas Cakupan Insentif	8
Bagian 2. Daya Saing Lembaga Riset Kebijakan	12
Menyuarakan Informasi Independen.....	14
Memaksimalkan Peran Aktor Nonpemerintah.....	16
Mengevaluasi Dampak PRI	18
Memastikan Keberlanjutan PRI.....	26
Penutup.....	29
Meninggalkan Warisan	30
Referensi	32

Daftar Singkatan

AIDRAN	: Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network
AIPI	: Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia
ALMI	: Akademi Ilmuwan Muda Indonesia
amdal	: analisis mengenai dampak lingkungan
ANU	: Australian National University
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ARK	: Aliansi Riset Kebijakan
ASWGI	: Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia
balitbang	: badan penelitian dan pengembangan
Bappenas	: Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	: bahan bakar minyak
BRIN	: Badan Riset dan Inovasi Nasional
CIPG	: Centre for Innovation Policy and Governance
Covid-19	: <i>coronavirus disease</i> 2019
CSIS	: Centre for Strategic and International Studies
CWI	: Cakra Wikara Indonesia
DFAT	: Department of Foreign Affairs and Trade
DRPM	: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
ELSAM	: Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat
FGD	: <i>focus group discussion</i>
GEDSI	: <i>gender equality, disability, and social inclusion</i>
IRE	: Institute for Research and Empowerment
K/L	: kementerian dan lembaga
Kemendes PDTT	: Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
Kemendikbud	: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kemendikbudristek	: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi
Kemenkeu	: Kementerian Keuangan
Kemenko PMK	: Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan

Kemenristek	: Kementerian Riset dan Teknologi
Kemenristekdikti	: Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Kemensetneg	: Kementerian Sekretariat Negara
KPPOD	: Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah
KSI	: Knowledge Sector Initiative
K2P	: <i>knowledge to policy</i>
LAN	: Lembaga Administrasi Negara
LIPI	: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
LKPP	: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
LPPM	: Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
ornop	: organisasi nonpemerintah
PAK	: Pusat Analisis Kebijakan
Permen PAN dan RB	: Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
perpres	: peraturan presiden
PII	: Persatuan Insinyur Indonesia
PKMK UGM	: Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada
pokja	: kelompok kerja
PP	: peraturan pemerintah
PPIM UIN	: Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri
PRI	: <i>policy research institute</i>
PSHK	: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia
PUI-PT PPH PUK2IS	: Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi Pusat Penelitian HIV AIDS Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial
PUSAD	: Pusat Studi Agama dan Demokrasi
RI	: Republik Indonesia
RPJMN	: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RPP	: Rancangan Peraturan Pemerintah
SDM	: sumber daya manusia
Seknas FITRA	: Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran
Simlitabmas	: Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
SPG	: <i>strategic partnership grants</i>
TCID	: The Conversation Indonesia
UU	: undang-undang
UUD	: Undang-Undang Dasar
UU Sisnas Iptek	: Undang-Undang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Pengantar

Krisis moneter pada 1997 menghantam sebagian besar negara Asia, khususnya Asia Tenggara. Di Indonesia, masalah keuangan tersebut sedemikian besar sehingga menciptakan turbulensi sosial dan politik pada 1998—sebuah tahun yang mendorong terjadinya reformasi besar-besaran. Indonesia berhasil melewati masa-masa sulit tersebut, bahkan secara stabil memosisikan diri di antara negara-negara yang tergolong berpenghasilan menengah pada awal 2000-an.

Kondisi politik dan ekonomi Indonesia dapat terus bertahan stabil terutama karena ditopang kinerja harga komoditas seperti minyak, batu bara, dan sawit. Krisis global yang terjadi pada 2008 merusak tatanan fiskal sebagian negara. Namun, pada masa sulit tersebut, Indonesia justru mengalami pertumbuhan ekonomi secara kuat. Sebagai ilustrasi, minyak yang semula berada di kisaran harga US\$ 29,32 per barel pada 2004 dihargai sebesar US\$ 142,03 per barel dalam selang waktu empat tahun.

Meski demikian, dampak positif dari kenaikan harga komoditas tidak berlangsung secara berkelanjutan. Proporsi subsidi bahan bakar minyak (BBM) yang besar dalam postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) memberikan tekanan terhadap rencana pembangunan yang dicanangkan pemerintah Republik Indonesia (RI). Kondisi ini memunculkan kesadaran bahwa bergantung sepenuhnya pada komoditas mentah atau setengah jadi, serta konsumsi yang tidak terkontrol, akan menyulitkan Indonesia keluar dari perangkap pendapatan menengah (*middle income trap*).

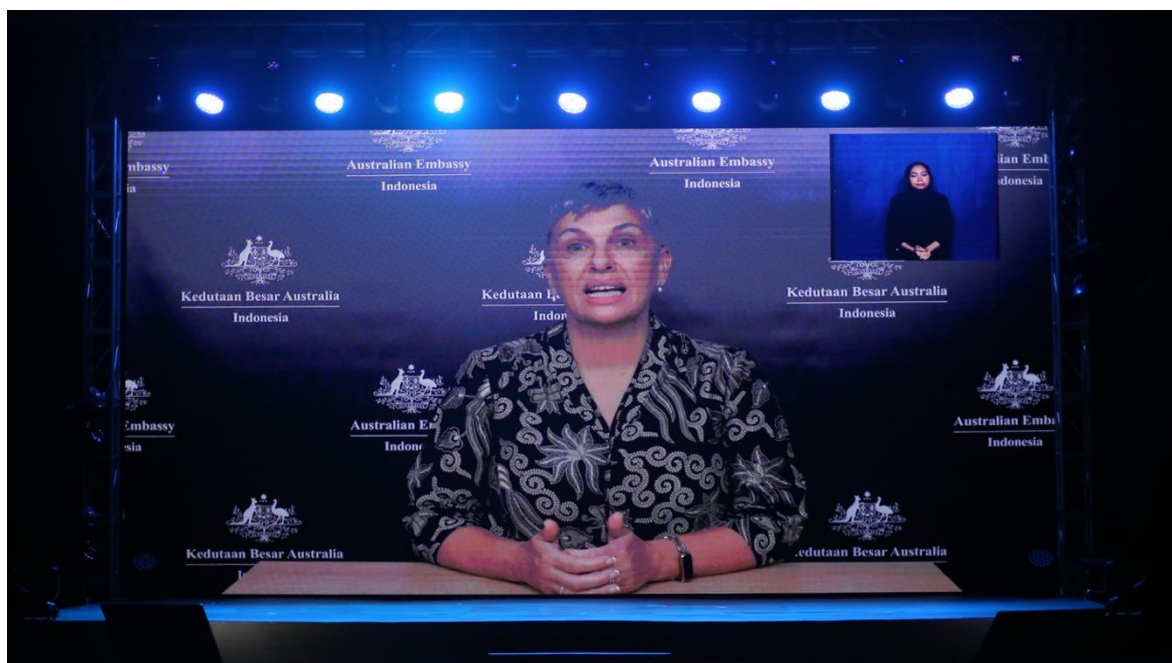
Ambisi menjadi negara maju, seperti termaktub dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, mengharuskan adanya perubahan terhadap paradigma lama. Indonesia harus beranjak dari negara konsumen menjadi negara produsen. Idealnya, mimpi tersebut hanya dapat terwujud jika diperkuat dengan kerangka kebijakan yang efektif dan inovatif. Namun, lebih dari satu dekade pasca-Reformasi, negara masih kesulitan dalam mewujudkan ekosistem pengetahuan berbasis riset sebagai tulang punggung pembangunan. Hal ini, misalnya, dapat dilihat dari minimnya peningkatan di bidang pengetahuan selama periode 2010–2014.

Selain masalah data dan sumber daya manusia (SDM), pendanaan penelitian di Indonesia masih terbatas jika dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara. Keterbatasan

tersebut menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam hal produktivitas riset yang berkualitas baik dan berkuantitas cukup. Padahal, tantangan Indonesia ke depan sangat besar, antara lain menyikapi bonus demografi pada 2030.

Mendorong Perubahan

Sebagai bentuk kemitraan antara pemerintah RI dan pemerintah Australia, program Knowledge Sector Initiative (KSI) mendapat mandat untuk ikut berkontribusi meningkatkan kapasitas dan kapabilitas para pemangku kepentingan dalam pengembangan sektor pengetahuan. Sebagai organisasi yang dinamis, KSI mengambil peran sebagai fasilitator bagi para aktor pengetahuan, terutama dari kalangan pemerintah, swasta, dan organisasi nonpemerintah (ornop).¹ Program-program KSI diharapkan dapat meningkatkan kualitas produksi pengetahuan, memperluas kolaborasi antaraktor penting, serta menyediakan dukungan finansial dan teknis terhadap lembaga-lembaga riset kebijakan.



"KSI bertujuan mendukung pemerintah Indonesia dalam memperkuat kebijakan berbasis bukti dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan. Hal ini dicapai melalui dukungan terhadap empat pilar penting dalam ekosistem pengetahuan."

Penny Williams, Duta Besar Australia untuk Indonesia

Dokumen ini menyajikan cerita-cerita perubahan yang dilakukan KSI bersama aktor-aktor pengetahuan di Indonesia dengan fokus terhadap aspek **insentif riset** dan kolaborasi dengan **lembaga penelitian mitra** dalam rangka produksi pengetahuan. Secara spesifik, kegiatan-kegiatan dalam dokumen ini merangkum Fase 1 (2013–2017) dan Fase 2 (2017–2022).

¹ KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2, hlm. 2

Fase 1 menerapkan pendekatan yang lebih makro dan variatif, seperti mengadvokasi perubahan pada peraturan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Upaya tersebut membuahkan hasil pada awal Fase 2, tepatnya Maret 2018, yang ditandai dengan pengesahan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018. Perpres ini memungkinkan pemerintah pusat dan daerah memberikan mandat penelitian kepada ornop dan lembaga penelitian kampus. Namun, regulasi tersebut hanya satu dari beberapa elemen yang berkontribusi terhadap kesuksesan perwujudan ekosistem pengetahuan. Adapun memasuki Fase 2, KSI melakukan beberapa penyesuaian dalam implementasi program. Tujuan dan objektif disusun secara lebih spesifik berdasarkan pembelajaran pada fase sebelumnya.² Selain itu, KSI melaksanakan restrukturisasi terhadap tim sehingga lebih lincah dan fleksibel terhadap perkembangan situasi eksternal yang dinamis.

Kolaborasi dengan aktor-aktor kunci menjadi strategi organisasi dalam upaya meningkatkan produksi pengetahuan berkualitas. Adapun prinsip-prinsip berkelanjutan dan inklusivitas, seperti *gender equality, disability, and social inclusion* (GEDSI), menjadi pedoman dalam mendesain berbagai jenis program relevan sepanjang periode 10 tahun. Karena itu, informasi yang tersedia dalam dokumen ini diharapkan bermanfaat bagi pengusung visi ekosistem pengetahuan yang berkualitas ke depannya.

² Ibid, hlm. 3



Bagian 1.

Insentif Riset bagi Ekosistem Pengetahuan

Ekosistem pengetahuan didefinisikan sebagai “pemikiran kontemporer tentang cara-cara pengetahuan (termasuk riset) diciptakan, dibagikan, dan diterima, dengan penekanan khusus pada agen-agen manusia dan teknologi yang menciptakan, menyimpan, mengakses, menyampaikan, dan menerapkan pengetahuan.” Dalam hal ini, proses tersebut melibatkan beberapa aktor, seperti produsen, fasilitator, pemakai, dan perantara pengetahuan (Hertz, Brinkerhoff, Bush, & Karetji, 2020).³

Pada Fase 1, KSI mengidentifikasi pemahaman mengenai faktor-faktor penunjang dan penghambat perkembangan sektor pengetahuan yang sehat. Informasi tersebut diperoleh melalui analisis dan konsultasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari pemerintah, lembaga penelitian, universitas, maupun ornop. Beberapa poin penting adalah⁴

1. kualitas riset, analisis, dan komunikasi kebijakan masih memerlukan penyempurnaan agar lebih mudah diterima pemangku kepentingan dalam perumusan kebijakan;
2. porsi pembiayaan riset dari pemerintah dan swasta masih terbatas serta dinilai dapat lebih efisien;
3. kerangka regulasi yang mendukung penerapan kebijakan berbasis bukti perlu didorong; dan
4. insentif untuk menerapkan riset dan analisis dalam perumusan kebijakan tersedia secara terbatas.

Butir empat mengenai insentif menjadi salah satu pokok bahasan penting pada awal Fase 2 karena berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem pengetahuan pascaprogram KSI. Ketika itu, insentif finansial dan nonfinansial yang memadai bagi produsen ilmu pengetahuan masih terbatas. Padahal, kerangka insentif yang jelas bagi peneliti atau penyandang dana berpotensi

³ *Knowledge Systems: Evidence to Policy Concepts in Practice*, hlm. 2

⁴ *KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2*, hlm. 5–6

menstimulasi keluaran atau investasi riset yang lebih tinggi. Merujuk pada tantangan tersebut, KSI berupaya mendorong berbagai opsi skema insentif, seperti angka kredit dosen, indikator GEDSI, dan perizinan peneliti internasional.



“Sebagai peneliti sosial-humaniora, kita perlu parsial terhadap orang yang paling termarginalisasi—paling terpinggirkan suaranya dari arus utama—di antaranya kaum miskin, perempuan, orang dengan disabilitas, dan orang-orang minoritas lain yang memiliki bahasa dan sistem pengetahuan yang berbeda.”
Inaya Rakhmani, anggota kehormatan ALMI

Terhadap angka kredit dosen, KSI berupaya meningkatkan minat tenaga pengajar di universitas untuk menghasilkan risalah kebijakan (*policy brief*) sebagai bagian dari pengabdian masyarakat sekaligus menjadi salah satu poin yang menambah angka kredit dosen untuk peningkatan jabatan fungsional. Saat ini, kebijakan mengenai promosi jabatan serta rekrutmen untuk peneliti dan dosen memiliki fokus utama pada aspek-aspek akademis. Universitas-universitas di Indonesia lebih memprioritaskan pengajaran daripada penelitian, dan mengutamakan penelitian akademis daripada penelitian kebijakan.⁵ Padahal, pengembangan aktor pengetahuan sangat bergantung pada optimalisasi universitas. Angka kredit dosen akan menjadi salah satu insentif yang tepat untuk meningkatkan produktivitas riset.

Inisiatif kedua tentang indikator GEDSI memiliki tujuan meningkatkan angka partisipasi akademisi perempuan dan penyandang disabilitas dalam riset kebijakan.⁶ Selain itu, keberadaan panduan hibah penelitian dengan perspektif GEDSI akan memastikan kajian yang dilakukan berlandas pada prinsip-prinsip kesetaraan gender, disabilitas, dan inklusi sosial. Insentif riset yang akan diberikan untuk perempuan dan penyandang disabilitas terbagi dalam dua jalur, yaitu sebagai pelaku penelitian dan topik yang diangkat. Sebagai konteks, kajian

⁵ Laporan Tahunan KSI 2018, hlm. 13

⁶ Laporan Tahunan KSI 2018, hlm. 13

Cakra Wikara Indonesia (CWI) dan KSI pada periode 2013–2015 menunjukkan, penelitian seputar isu GEDSI hanya sejumlah 2–3 persen dari 25 ribu proposal pengajuan dana hibah penelitian dari Kementerian Riset dan Teknologi (Kemenristek).⁷

Terakhir, KSI berfokus pada insentif berupa kelaikan etik (*ethical clearance*) dan perizinan riset asing untuk melakukan penelitian di Indonesia, dengan tetap memprioritaskan penelitian yang sensitif terhadap GEDSI.⁸ Upaya pengarusutamaan topik ini dilakukan melalui penguatan perumusan dan implementasi kebijakan pemerintah setingkat peraturan pemerintah (PP) atau turunannya. Keterbukaan terhadap prinsip-prinsip kolaborasi secara global diharapkan mendorong peningkatan kualitas riset sebagai landasan kebijakan.

Mengurai Determinan Riset Berkualitas

Program KSI dimulai pada 2013 dan berakhir pada 2022. Artinya, sekitar 90 persen dari masa implementasi berlangsung bersamaan dengan periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Konteks ini mendasari pembahasan mengenai upaya KSI mendorong peningkatan jumlah dan besaran insentif riset dalam rangka memperkuat ekosistem pengetahuan di Indonesia.

Ada tiga hal yang dinilai menentukan kualitas dan kuantitas keluaran riset, yakni SDM unggul, infrastruktur mumpuni, dan akses pendanaan merata. Keberadaan SDM dengan kompetensi standar tertentu merupakan salah satu komponen yang menentukan laju keberhasilan sebuah kelompok, institusi, atau negara. Meski demikian, kesuksesan mendapatkan SDM berkualitas di Indonesia adalah persoalan yang sudah berlangsung lama dan terjadi di berbagai sektor, tidak eksklusif pada sektor penelitian. Pertemuan antara Presiden dan Persatuan Insinyur Indonesia (PII) pada Mei 2015 menjadi contoh konkret masalah ini. Periode pertama Presiden Jokowi (2014–2019) menitikberatkan pembangunan infrastruktur secara masif. Namun, ketika itu, tercatat hanya ada 700 ribu insinyur. Bahkan, hanya 45 persen dari angka tersebut yang bekerja di bidangnya.⁹

Dalam masa jabatan kedua, Presiden Jokowi mengalihkan fokus terhadap pembangunan SDM serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Visi tersebut tecermin antara lain melalui pilar pertama dari empat pilar pembangunan nasional pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024. Adapun pengejawantahan visi tersebut dilandaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Sisnas Iptek). Penerbitan undang-undang menjadi bukti nyata komitmen

⁷ *Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017–2020*, hlm. 6

⁸ Laporan Tengah Tahun KSI 2021, hlm. 12

⁹ Humas, “Sudah Punya 700 Ribu, Indonesia Masih Butuh 120 Ribu Insinyur,” *Setkab.go.id*, 19 Mei 2015, <https://setkab.go.id/sudah-punya-700-ribu-indonesia-masih-butuh-120-ribu-insinyur/>

pemerintah RI terhadap riset dan inovasi, yang kemudian diamanatkan kepada Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN).



"Dalam konteks kebijakan, pengetahuan tidak dapat berdiri sendiri. Sebaliknya, kebijakan tidak bisa dibuat dalam absennya pengetahuan. Mengapa? Karena integrasi pengetahuan di dalam proses kebijakan amat penting untuk memastikan apa yang diniatkan oleh kebijakan atau rencana pembangunan itu bisa mengantisipasi dampak-dampak tak termaksud."

Yanuar Nugroho, CIPG

Adanya kerangka kebijakan yang berpihak pada ekosistem pengetahuan merupakan langkah awal. Namun, para pemangku kepentingan perlu bergerak cepat, terutama dalam mengatasi isu seputar SDM penelitian, seperti kurangnya pelatihan di universitas untuk pengembangan kemampuan riset dan analisis, rendahnya pendapatan dosen dan peneliti, serta peneliti belum menjadi pekerjaan yang banyak diminati.¹⁰

Selain SDM, faktor infrastruktur dan pendanaan riset turut memerlukan perhatian lebih. Sebelum BRIN berdiri, ketiga faktor penentu keberhasilan riset tersebut tersebar di 74 kementerian dan lembaga (K/L). Fragmentasi sumber daya tersebut dinilai mengurangi kemampuan kompetitif penelitian Indonesia di ranah global.¹¹ Padahal, porsi anggaran riset dan pengembangan di Indonesia cenderung terbatas. Hal ini turut diperkuat pernyataan Presiden Jokowi yang menilai bahwa hasil riset K/L belum terlihat optimal, sehingga diperlukan pembuatan strategi besar terkait dengan riset dan tujuannya.¹²

¹⁰ Laporan KSI Fase I, hlm. 7

¹¹Riana, Friski, "Kepala BRIN Ungkap 2 Masalah Fundamental Riset di Indonesia," *Tempo.co*, 4 Januari 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1546480/kepala-brin-ungkap-2-masalah-fundamental-riset-di-indonesia>

¹² Faiz, Ahmad, "Jokowi Pertanyakan Hasil Riset dengan Anggaran Rp 24,9 Triliun," *Tempo.co*, 9 April 2018, <https://bisnis.tempo.co/read/1077794/jokowi-pertanyakan-hasil-riset-dengan-anggaran-rp-249-triliun/full&view=ok>

Tantangan juga hadir dalam proses perizinan riset dan kelaikan etik sehubungan dengan penundaan pengesahan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Penyelenggaraan Iptek karena dinamika seputar Perpres BRIN.¹³ Tanpa adanya peraturan turunan, UU Sisnas Iptek yang baru berpotensi memberikan disinsentif bagi peneliti di dalam dan di luar universitas, misalnya pengaturan perihal izin penelitian terpusat, persyaratan menyerahkan seluruh data penelitian pada sistem di pusat, serta sanksi administratif dan sanksi pidana bagi peneliti internasional yang beroperasi tanpa izin.¹⁴

Mendorong Insentif Tepat Guna

Upaya KSI dalam mendorong peningkatan insentif bagi penelitian menghasilkan perubahan awal pada dua area krusial, yaitu angka kredit dosen dan panduan penelitian GEDSI. Beberapa kajian yang dilakukan bersama lembaga riset kebijakan atau *policy research institute* (PRI) pada 2016 dan 2017 berhasil meningkatkan kesadaran para pemangku kepentingan mengenai urgensi angka kredit dosen sebagai insentif riset kebijakan. Bahkan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) menyambut usul pembuatan risalah kebijakan sebagai kegiatan pengabdian kepada masyarakat yang dihargai sebagai angka kredit dosen. Mekanisme tersebut diupayakan melalui pedoman operasional dari Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permen PAN dan RB) Nomor 46 Tahun 2013.¹⁵

Pada Juni 2020, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengeluarkan Surat Edaran Nomor 638/E.E4/KP/2020 mengenai Pedoman Operasional tentang Penilaian Angka Kredit Kenaikan Jabatan Fungsional/Pangkat Dosen. Pedoman ini mengamanatkan penambahan angka kredit pengabdian kepada masyarakat minimal 0,5 persen dan maksimal 10 persen dari angka kredit kumulatif. Sebelumnya, Permen PAN dan RB Nomor 17 Tahun 2013 menyebutkan angka maksimal 10 persen, tetapi tidak menuliskan angka kredit minimal.¹⁶

Di sisi lain, kemajuan positif dalam pengarusutamaan GEDSI ditandai melalui penyertaan konsep ke dalam panduan hibah Kemenristekdikti pada 2018. Selain itu, Kemenristekdikti memastikan panduan tersebut diaplikasikan ke dalam Sistem Informasi Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (Simlitabmas).¹⁷

Seiring dengan berjalannya waktu, KSI menilai dari sisi kapasitas dan sumber daya program bahwa prospek keberhasilan sistem kredit dosen perguruan tinggi, penguatan peran Lembaga

¹³ Laporan Tahunan KSI 2019, hlm. 23

¹⁴ Laporan Tahunan KSI 2019, hlm. 22

¹⁵ Laporan Tahunan KSI 2018, hlm. 14

¹⁶ Rekomendasi Kebijakan: Usulan Revisi Permen Pan dan RB No. 46 Tahun 2013 tentang Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya, hlm. 2

¹⁷ *Project Completion Report (draft)*, hlm. 15–16

Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM), serta perjuangan kesetaraan gender di perguruan tinggi masih rendah. Penilaian ini dipengaruhi beberapa faktor, baik eksternal maupun internal. Dari sisi eksternal, misalnya, reformasi sistem pendidikan tinggi diproyeksikan akan berlangsung lama. Sementara itu, faktor keterbatasan sumber daya menjadi penyebab dari sisi internal. Karena itu, KSI secara bertahap menghentikan atau mengurangi dukungan terhadap ketiga bidang tersebut.¹⁸

Memasuki 2020, penyebaran *coronavirus disease* 2019 (Covid-19) meningkat secara eksponensial dan secara resmi membawa dunia ke dalam kondisi pandemi. Situasi tersebut menghantam perekonomian global sekaligus meningkatkan risiko kesehatan, politik, dan sosial yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Semua pemangku kepentingan di sektor pemerintah, bisnis, dan komponen lainnya harus menyesuaikan prioritas di tengah pembatasan mobilitas.

Terlepas dari hambatan-hambatan ini, proses advokasi tetap berjalan. Pada tahun yang sama, ke-16 PRI, termasuk Centre for Innovation Policy and Governance (CIPG) dan Akademi Ilmuwan Muda Indonesia (ALMI), menyusun dan mengirimkan sebuah makalah posisi (*position paper*) kepada Kemenristek/BRIN. Naskah tersebut menjabarkan rekomendasi tentang pengaturan proses kelaikan etik, penyederhanaan izin riset asing, dan manajemen data riset. Pada prinsipnya, Kemenristek/BRIN menyambut baik gagasan kelaikan etik dan izin riset, tetapi dengan catatan hanya pada area yang menjadi otoritas mereka.¹⁹

Perkembangan menjanjikan ini berlanjut hingga 2021 ketika KSI terlibat dalam memberikan masukan terhadap perumusan RPP tentang Penyelenggaraan Iptek. Pokok bahasan yang diutamakan masih seputar insentif riset, seperti desentralisasi kelaikan etik dan penyederhanaan izin riset asing. Dalam upaya kolektif yang digawangi SMERU Research Institute tersebut, ke-16 PRI berupaya menuangkan pembaruan terhadap risalah kebijakan yang sebelumnya disampaikan pada Maret 2020. Versi final dari dokumen rekomendasi diterima tim penyusun RPP sebagai masukan terhadap proses penyusunan pasal per pasal.

Sementara itu, kemajuan dalam aspek GEDSI terus terjadi. Kemenristekdikti, Australian National University (ANU), dan Asosiasi Pusat Studi Wanita/Gender dan Anak Indonesia (ASWGI) berkolaborasi merancang skema baru untuk mempromosikan kesetaraan gender di kawasan universitas. Kemenristekdikti kemudian memperkenalkan indikator GEDSI baru pada metode pemeringkatan universitas.

Dalam rangka mendukung upaya tersebut, KSI bekerja sama dengan ALMI, ASWGI, Australia-Indonesia Disability Research and Advocacy Network (AIDRAN), Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK), dan The Conversation

¹⁸ Laporan Tahunan KSI 2019, hlm. 22

¹⁹ *Project Completion Report (draft)*, hlm. 14

Indonesia (TCID) untuk menyuarakan urgensi penguatan lembaga dan implementasi pedoman hibah penelitian peka GEDSI kepada BRIN dan Kemendikbud.²⁰

Mengadaptasi Dinamika Kepentingan

Kolaborasi nyata di antara para aktor sektor pengetahuan dianggap membuahkan hasil dalam mendorong insentif riset. Secara umum, terdapat tren peningkatan jumlah proposal dengan unsur GEDSI yang masuk ke Simlitabmas yang dikelola Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat (DRPM) Kemenristek/BRIN.²¹ Dari sekitar 6,14 persen pada 2017, proposal GEDSI menjadi 7,4 persen dua tahun berikutnya. Walaupun secara keseluruhan terjadi penurunan kuantitas yang signifikan pada 2019, proposal berunsur GEDSI tetap menunjukkan peningkatan jika dibandingkan dengan data pada 2017.

Tabel 1. Jumlah Proposal Penelitian pada Simlitabmas DRPM²²

Tahun	Total Proposal	Proposal GEDSI	Proporsi (%)
2017	44.051	2.706	6,14
2018	46.443 ^{+2.392}	3.128 ⁺⁴⁴²	6,74 ^{+0,6}
2019	37.750 ^{-6.301}	2.795 ⁺⁸⁹	7,4 ^{+1,26}

Memperluas Cakupan Insentif

Inisiatif KSI dalam mendorong gagasan insentif untuk mewujudkan riset berkualitas yang peka GEDSI merupakan pijakan awal. Penyempurnaan metode dengan mempertimbangkan dinamika politik, sosial, dan ekonomi perlu menjadi pertimbangan bagi para pemangku kepentingan yang akan mengusung visi serupa. Beberapa pembelajaran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Konsep insentif dalam ekosistem pengetahuan sudah terinternalisasi dalam PRI

Setelah BRIN diresmikan pada September 2021, jaringan kelompok PRI langsung berkoordinasi untuk melakukan pembaruan terhadap risalah kebijakan mengenai kelaikan etik dan perizinan riset. Perlu dicatat bahwa inisiatif PRI ini tidak mendapat bantuan dana dari KSI. Artinya, kesadaran mereka untuk bergerak bersama sebagai aktor pengetahuan sudah terbentuk secara alamiah.

²⁰ Laporan Tengah Tahun KSI 2021, hlm. 12

²¹ Terdapat lima kata kunci utama yang sering dipilih para peneliti, yakni pemberdayaan (59,1 persen), perempuan (10,82 persen), kemiskinan (10,53 persen), gender (4,76 persen), dan disabilitas (3,03 persen).

²² Data Simlitabmas Kemenristek/BRIN 2017-2019 (data pada 2020 tidak dapat ditampilkan karena tim evaluasi tidak berhasil mendapatkan data jumlah total proposal yang diajukan perguruan tinggi)

2. Beberapa PRI sudah berada pada posisi strategis dalam memberikan rekomendasi

Gerakan kolektif yang melibatkan CIPG, SMERU Research Institute, ALMI, Akatiga, Article 33 Indonesia, PSHK, dan Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) mulai bergerak secara mandiri, baik dalam melakukan kajian maupun mengomunikasikannya kepada pemangku kepentingan. CIPG, misalnya, sudah mendekati para perwakilan pemerintah selain BRIN, misalnya Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), dalam rangka mengintegrasikan rekomendasi kebijakan ke dalam draf RPP Penyelenggaraan Iptek. Selain itu, tim penyusun draf RPP di BRIN sudah mengenal kelompok PRI dan membuka pintu untuk menerima masukan mengenai penyusunan pasal per pasal. Hubungan langsung dengan mereka menunjukkan bahwa BRIN sudah mengakui peran PRI dalam perumusan kebijakan.

3. Penerapan GEDSI membutuhkan keberpihakan mayoritas pemangku kepentingan

Pengarusutamaan prinsip-prinsip GEDSI selama dua fase menghasilkan kemajuan. Meski demikian, pada beberapa dimensi terjadi stagnasi, sehingga dibutuhkan strategi baru untuk menjadikan isu tersebut terlembaga. Dalam konteks ini, institusionalisasi GEDSI secara formal melalui panduan hibah penelitian telah terwujud, tetapi tidak diketahui seberapa jauh penerimaan atau penerapannya di luar lingkup Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

Menindaklanjuti tiga hal di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Menggalang lebih banyak kolaborasi penelitian tingkat internasional

Pengusung visi ekosistem pengetahuan perlu mempromosikan pentingnya membangun jaringan peneliti kebijakan antara Indonesia dan negara lain, yang berpotensi memberikan manfaat bagi pemerintah dan kalangan peneliti dari proses kolaborasi dan pertukaran pengetahuan tersebut. Pelibatan berbagai lembaga internasional berpotensi memperbesar upaya komunikasi mengenai gagasan ini. Harapannya, Kemendikbudristek akan melihat pentingnya penyederhanaan proses perizinan penelitian asing.²³

2. Mendukung keberadaan PRI lintas sektor dalam satu payung

GEDSI merupakan sebuah isu multidimensi. Artinya, solusi yang tepat sasaran hanya dapat dihasilkan melalui sintesis perspektif dan pemikiran yang heterogen. Pada tahap ini, ke-16 PRI yang terlibat bersama KSI sudah memiliki posisi tawar yang lebih strategis dalam mendorong isu GEDSI, baik di kalangan pemerintah maupun sesama peneliti. Namun, beberapa tantangan, seperti pemahaman *reviewer* tentang GEDSI dan riset perguruan tinggi yang masih eksklusif, membutuhkan kinerja dan partisipasi ekstra.^{24 25}

²³ Laporan Tahunan KSI 2020, hlm. 38

²⁴ *Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017–2020*, hlm. 8–9

²⁵ Studi evaluasi diterbitkan pada 2021.

Dalam kasus ini, memperluas jaringan peneliti secara kolektif di Indonesia berpotensi mempercepat proses adopsi GEDSI.



Bagian 2.

Daya Saing Lembaga Riset Kebijakan

Kebijakan publik didefinisikan Sullivan (2009) sebagai “apa yang pemerintah lakukan dan mengapa hal tersebut berorientasi terhadap tindakan tertentu dalam merespons isu publik.” Howlett dan Mukherjee (2017) kemudian memperkaya pandangan dengan penjelasan bahwa walaupun kebijakan publik ditentukan pemerintah, pengembangan dan penerapannya melibatkan berbagai macam aktor dan institusi.²⁶

Keberadaan aktor dan institusi di luar pemerintah sangat krusial dalam merumuskan kebijakan publik yang tepat sasaran. Reformasi yang terjadi pada 1998 membuka ruang bertumbuhnya beberapa lembaga studi pemerintahan. Namun, temuan Sherlock (2012) mengindikasikan bahwa proses perumusan kebijakan secara riil masih mengabaikan peran aktor nonpemerintah, khususnya dari kalangan akademis.²⁷

Pengecualian aktor nonpemerintah dinilai menghambat lahirnya kebijakan berkualitas. Menurut Datta (2011), proses formal di kalangan pemerintah RI belum selalu mengikuti prosedur standar. Bahkan, kajian sebelumnya menemukan beberapa naskah akademis yang seharusnya menjadi landasan aturan masih “kurang secara substansi.”²⁸ Hal ini kemudian melahirkan pertanyaan mengenai potensi memaksimalkan permintaan (*demand*) dan penawaran (*supply*) terhadap kebijakan berbasis bukti.

Program KSI didesain sebagai respons atas masalah permintaan dan penawaran terhadap riset, bukti, dan analisis di tengah sistem sektor pengetahuan.²⁹ Adapun tujuan besar KSI adalah mendorong produksi pengetahuan berkualitas dan membangun kesadaran pembuat kebijakan.³⁰ Salah satu strategi guna mewujudkan target tersebut adalah kerja sama dengan lembaga riset kebijakan atau PRI di Indonesia. PRI berperan dalam memproduksi riset kebijakan, sedangkan KSI memberikan bantuan teknis dan finansial. KSI juga membantu PRI mengomunikasikan hasil risetnya kepada publik dan pemerintah, sehingga ke depannya,

²⁶ *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle*, hlm. 3

²⁷ *Ibid*, hlm. 4

²⁸ *Ibid*, hlm. 10

²⁹ *KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2*, hlm. 22

³⁰ Program Completion Report KSI, hlm. 4

koneksi antara sisi permintaan (pembuat kebijakan) dan penawaran (peneliti) dapat berjalan secara berkelanjutan.

Tabel 2. Daftar Ke-16 PRI dan Area Fokus

No.	Nama	Fokus
1	Akatiga Pusat Analisis Sosial	Kelompok marginal, tenaga kerja, dan reformasi agraria
2	Article 33 Indonesia	Industri ekstraktif, pendidikan, dan kesehatan
3	Centre for Strategic and International Studies (CSIS)	Ekonomi, politik, dan hubungan internasional
4	Cakra Wikara Indonesia (CWI)	Perempuan dalam politik dan birokrasi
5	Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)	Hak asasi manusia
6	Institute for Research and Empowerment (IRE)	Ekonomi daerah, pendayagunaan komunitas masyarakat untuk pembangunan
7	Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD)	Ekonomi, izin usaha, dan otonomi daerah
8	Pusat Kebijakan dan Manajemen Kesehatan Universitas Gadjah Mada (PKMK UGM)	Kesehatan masyarakat, jaminan kesehatan nasional, dan sistem pengetahuan kesehatan
9	Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi Pusat Penelitian HIV AIDS Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial (PUI-PT PPH PUK2IS) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya	Kesehatan HIV/AIDS, kesehatan jiwa, dan kelompok marginal
10	Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat (PPIM) UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	Intoleransi, pendidikan agama
11	Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina	Keberagaman agama dan demokrasi
12	Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK)	Reformasi hukum
13	Sajogyo Institute	Reformasi agraria
14	Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA)	Transparansi, efektivitas, serta sinkronisasi perencanaan dan penggunaan anggaran
15	The SMERU Research Institute	Kemiskinan dan kesenjangan, jaminan sosial, pendidikan, serta kesehatan dan nutrisi
16	SurveyMETER	Pendidikan, kesehatan, dan isu masyarakat lanjut usia

Pada Fase 1, KSI menjalin kemitraan dan mendukung pengembangan 16 PRI yang terdiri atas pusat studi universitas dan ornop. Pemilihan lembaga-lembaga tersebut didasari beberapa pertimbangan, di antaranya rekam jejak mereka sebagai wadah pemikir (*think tank*) dengan

reputasi dan pengalaman yang kuat dalam memberikan bukti-bukti ilmiah untuk menjadi basis perumusan kebijakan publik. Dukungan KSI kemudian diarahkan ke upaya peningkatan (i) kemampuan manajerial organisasi dan finansial yang berkelanjutan, (ii) kualitas dan relevansi kajian, serta (iii) kapabilitas dalam mengomunikasikan hasil riset kepada pembuat kebijakan.³¹ Selain itu, KSI menjajaki kerja sama dengan beberapa institusi pemerintah, termasuk Pusat Analisis Kebijakan (PAK) milik Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), unit riset dan pengembangan di kementerian, serta analisis kebijakan.³²

Menjelang berakhirnya Fase 1, KSI mengevaluasi penyelenggaraan kemitraan dan memutuskan beberapa penyesuaian dalam implementasi pada Fase 2. Program pengembangan PRI kini terfokus pada penguatan fungsi inti dari sebuah lembaga riset, yaitu (i) memproduksi riset kebijakan berkualitas, (ii) mengembangkan jaringan yang kuat dan efektif, (iii) memengaruhi arah diskusi kebijakan, serta (iv) memperkuat kapasitas finansial secara berkelanjutan.³³ Hal ini diwujudkan antara lain melalui bantuan teknis dan dana dalam peningkatan kapasitas dan finansial.

Contoh bantuan teknis yang diberikan KSI adalah penyediaan sarana proses bisnis yang berfokus pada pembangunan relasi dengan pembuat kebijakan dan penerjemahan kajian, seperti pembuatan logika program sebagai sebuah mekanisme perencanaan strategis untuk mendesain, mendukung, dan memantau implementasi atau pengejawantahan temuan riset dalam memengaruhi proses perumusan kebijakan.

PRI turut didorong untuk melakukan pemetaan dan analisis terhadap para pemangku kepentingan kunci, seperti pembuat kebijakan, aktor kebijakan nonpemerintah, dan media. Metode tersebut diperlukan sehingga PRI dapat memantau dan mengevaluasi secara mandiri apakah riset yang mereka hasilkan sudah cukup berkualitas dalam memengaruhi proses perumusan kebijakan. Harapannya, PRI sebagai aktor dalam ekosistem pengetahuan mampu mendukung pembuatan kebijakan berbasis bukti, membangun jaringan yang kuat dan efektif, serta memperkuat kemandirian finansial dan organisasi mereka.³⁴

Menyuarakan Informasi Independen

Upaya penguatan kapasitas dan kapabilitas PRI dalam konteks pengarusutamaan konsep *knowledge to policy* (K2P) memiliki dimensi isu yang kompleks. Pada mulanya, program KSI berfokus untuk mendukung para aktor kunci dalam ekosistem pengetahuan, terutama para peneliti (sisi penawaran) dan para pembuat kebijakan di pemerintah (sisi permintaan). Namun,

³¹ *KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2*, hlm. 27

³² *Ibid*, hlm. 6

³³ Terlepas dari progres yang dicapai Fase 1 secara kuantitas, konsep “riset berkualitas” belum terdefinisikan atau belum dipahami secara baik oleh para pemangku kepentingan. Lebih detail mengenai hal ini akan dibahas pada segmen berikutnya.

³⁴ Knowledge Sector Initiative, 2019, hlm. 24

evaluasi menunjukkan bahwa dimensi penawaran (PRI) dan permintaan (pemerintah) berjalan masing-masing tanpa berhubungan.³⁵ Lebih lanjut, proses perumusan kebijakan publik di Indonesia tidak memiliki satu pola spesifik.³⁶ Terdapat faktor-faktor tak terduga yang berpotensi memengaruhi alur pengambilan keputusan. Artinya, diperlukan pendekatan yang lebih strategis—atau setidaknya pragmatis—jika ingin memaksimalkan peran PRI dalam proses tersebut.

Hal lain yang menjadi catatan adalah soal konsep “riset kebijakan berkualitas”. Ketika itu, belum ada kesepakatan di antara para pemangku kepentingan mengenai indikator apa saja yang menentukan bagaimana sebuah analisis kebijakan dinilai memiliki bobot baik atau sesuai dengan standar.³⁷ Kecenderungan yang ada adalah menganggap riset yang berkualitas adalah yang metode dan hasilnya diakui serta diterima forum dan literatur akademis. Namun, masih terdapat ruang kualitas yang perlu diisi agar riset yang dilakukan dapat secara tepat dan strategis mendukung proses pembuatan kebijakan (Think Tank Initiative Insight, 2019). Tanpa ada kejelasan dan kesepahaman konsep, dukungan terhadap PRI berpotensi menjadi tidak maksimal.

Adapun beberapa kondisi yang teridentifikasi sebagai aspek yang menghambat produksi pengetahuan berkualitas adalah sebagai berikut.³⁸

1. Universitas belum menyediakan pelatihan cukup dalam hal kemampuan riset dan analisis.
2. Penelaahan sejawat (*peer review*) belum jamak digunakan untuk menilai kualitas riset dan analisis.
3. Dosen dan peneliti menerima gaji rendah, sehingga sering kali mereka yang terbaik menerima tawaran bekerja di luar negeri.
4. Riset belum menjadi jenjang karier yang atraktif.
5. Kebijakan rekrutmen dan promosi bagi dosen dan peneliti belum berdasarkan penilaian performa.
6. Kebanyakan badan penelitian dan pengembangan (balitbang) belum memiliki insentif atau pengetahuan yang cukup untuk memproduksi riset atau analisis berkualitas.
7. Belum banyak peneliti dengan keahlian di bidang gender dan inklusi sosial.

³⁵ KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2, hlm. 23

³⁶ *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle*, hlm. 28

³⁷ KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2, hlm. 22

³⁸ *Phase 1 Achievements*, hlm. 7

Selain itu, KSI menyoroti minimnya aspek GEDSI dalam konten riset. Berdasarkan analisis studi pelingkupan yang dilaksanakan Sajogyo Institute, perspektif GEDSI belum sepenuhnya terakomodasi dalam hibah penelitian Kemenristekdikti periode 2013–2015.³⁹

Ada tiga hambatan yang teridentifikasi dalam mekanisme hibah penelitian. Pertama, ruang penelitian Kemenristekdikti yang cenderung bias ilmu eksakta dianggap tidak terhubung dengan persoalan gender atau setidaknya dianggap netral gender. Isu gender tidak tampak dalam riset-riset ilmu eksakta. Di sisi lain, peneliti ilmu humaniora sulit mendapat peluang untuk mengeksplorasi tema-tema kritis, seperti GEDSI.

Kedua, penelitian Kemenristekdikti cenderung berorientasi pada pembangunan dan kebutuhan dasar terhadap penelitian unggul sebagai bagian dari invensi teknologi tepat guna. Ketiga, perspektif GEDSI dipahami sebatas dasar oleh para peneliti. Misalnya memosisikan perempuan sebagai objek pembangunan (penerima manfaat pasif) dan secara tersirat memberikan stigma lemah, harus diatur, serta dianggap kurang terampil—alih-alih melakukan analisis kritis terhadap relasi kuasa berbasis gender—yang memojokkan mereka dalam situasi tersebut.

Memaksimalkan Peran Aktor Nonpemerintah

Dalam rancangan strategi program, KSI berperan sebagai pemberi dukungan finansial dan penghubung kepada para pemangku kepentingan di sektor pengetahuan. PRI diberi fleksibilitas dalam menentukan isu spesifik dan rencana kerjanya, selama mencapai target-target umum yang disepakati.⁴⁰

KSI dan PRI mulai membuka penajakan intensif dengan pembuat kebijakan pada 2015. Ketika itu, beberapa PRI melakukan riset kebijakan mengenai desa, reformasi hukum, dan kerja sama riset dengan perguruan tinggi. Diskusi Bappenas, balitbang, dan Lembaga Administrasi Negara (LAN) yang melibatkan KSI menyimpulkan, data perencanaan dan penganggaran pembangunan di Indonesia belum tersedia dalam satu sistem yang terintegrasi.⁴¹ Situasi tersebut dinilai dapat menghambat kinerja lembaga-lembaga pemerintah.

Di sisi lain, delapan PRI berkolaborasi dengan Bappenas, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendagri), serta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk membentuk sebuah kelompok kerja (pokja) pembangunan dan tata kelola perdesaan. Program ini berhasil mengadakan sekitar 130 sesi, yang terdiri atas rapat, lokakarya, dan diskusi kelompok terarah atau *focus group discussion* (FGD).⁴²

³⁹ Aksi Kolektif Pengarusutamaan GEDSI dalam Penelitian

⁴⁰ Knowledge Sector Initiative, 2019, hlm. 34

⁴¹ Program Completion Report KSI, hlm. 22

⁴² Phase 1 Achievements, hlm. 7

Selain itu, Bappenas memimpin program reformasi birokrasi yang melibatkan tujuh lembaga pemerintah dan enam PRI. Dalam program ini, sekitar 80 acara diadakan untuk merumuskan gagasan-gagasan guna membuat birokrasi lebih efisien.⁴³ PRI juga terlibat dalam program penelitian bersama perguruan tinggi yang dipimpin Kemenristekdikti dan Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI). Pada awalnya, program ini hanya melibatkan empat universitas, tetapi selanjutnya ornop juga ikut terlibat dalam mendukung program tersebut.⁴⁴

KSI juga mendorong agar riset-riset PRI relevan dengan isu publik sehingga menjadi rekomendasi bagi kebijakan pemerintah, seperti riset kelompok disabilitas dan lanjut usia SurveyMETER yang dijadikan acuan kebijakan Kota Balikpapan (2015) dan Bali (2018). Pada tingkat nasional, SMERU Research Institute bersama Bappenas berhasil mengembangkan indeks pembangunan inklusif, yang kemudian hasilnya diadopsi dalam cetak biru pembangunan Indonesia 2020–2025.



"Di tingkat nasional, kami dipercaya Bappenas untuk mengembangkan Sistem Informasi Lanjut Usia yang disebut Silani. Sistem ini diterapkan di tujuh desa/kelurahan yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, dan DKI Jakarta."

Ni Wayan Suriastini, SurveyMETER

Ke-16 PRI mulai membangun Aliansi Riset Kebijakan (ARK) Indonesia pada September 2016. Tujuan konsolidasi ini adalah menggabungkan sumber daya dan disiplin ilmu untuk mengatasi isu sistemis yang dihadapi sektor pengetahuan. Perkembangan ini menyebabkan adanya perubahan dalam mekanisme pendanaan KSI, yang kini diberikan kepada ARK.

⁴³ Ibid

⁴⁴ Ibid

Adapun sejak 2019, PRI diberi kontrak tahun jamak (*multi-year contract*) dana hibah kerja sama strategis atau *strategic partnership grants* (SPG), yang memungkinkan mereka lebih strategis dalam memikirkan opsi terbaik berkontribusi terhadap perumusan kebijakan.⁴⁵ Mereka didorong agar berada dalam relasi dekat dengan para pembuat kebijakan selama keseluruhan proses, dari identifikasi masalah pembangunan, penyusunan target dan cakupan kajian, pengerjaan riset, diskusi temuan awal, hingga pengembangan rekomendasi kebijakan. Selain itu, mereka diharapkan berinteraksi dengan para pemangku kebijakan lainnya, seperti rekan sejawat, organisasi internasional, dan media, dalam rangka meninjau, menganalisis, serta menemukan perspektif alternatif mengenai hasil kajian.

KSI juga menetapkan kriteria tertentu bagi PRI guna memastikan keluaran riset yang berkualitas. Kriteria yang dimaksud misalnya (i) penerapan metodologi dan implementasi penelitian yang kuat, (ii) pemilihan daftar pustaka yang berkualitas dan berpengaruh, (iii) keberadaan mekanisme penelaahan sejawat dalam desain program dan pelaporan, (iv) pandangan pengguna bahwa temuan relevan dan bermanfaat, serta (v) bukti penggunaan hasil penelitian dalam perumusan kebijakan.⁴⁶

Mengevaluasi Dampak PRI

Pada akhir Fase I, semua PRI telah menjalin hubungan dengan pembuat kebijakan. Namun, beberapa PRI terlihat lebih intens berkomunikasi dibandingkan dengan yang lain. Hal itu terjadi karena beberapa PRI mengalami perubahan kepemimpinan, pergantian staf, atau pergeseran tujuan organisasi. Dinamika keorganisasian seperti itu menjadi tantangan cukup besar yang sedikit-banyak memelankan laju progres para PRI.⁴⁷

Pada 2018, terdapat sekitar 40 proyek penelitian baru yang dikembangkan PRI. Empat belas PRI telah aktif berkomunikasi dengan pemerintah untuk terlibat dalam perumusan kebijakan, sedangkan dua PRI lain lebih berfokus memproduksi penelitian berkualitas tinggi dan menyebarkan temuannya dalam wadah populer untuk meningkatkan kesadaran publik terhadap kebijakan berbasis bukti.⁴⁸ Beberapa PRI juga telah mendapat pengakuan internasional dalam hal kerja sama dan jaringan penelitian. Misalnya, Centre for Strategic and International Studies (CSIS) dinobatkan sebagai wadah pemikir terbaik di Asia Tenggara dan Pasifik. Selanjutnya, karya SMERU tentang indeks pembangunan inklusif yang dikembangkan bersama Bappenas mendapat perhatian dari Ford Foundation, yang kemudian memberikan dukungan finansial tambahan untuk perluasannya.⁴⁹

⁴⁵ *Project Completion Report (draft)*, hlm. 28

⁴⁶ *Ibid*, hlm. 29

⁴⁷ *Phase 1 Achievements*, hlm. 17

⁴⁸ Knowledge Sector Initiative, 2019, hlm. 24

⁴⁹ Knowledge Sector Initiative, 2019, hlm. 25–26

Pada 2019, enam PRI mengadakan riset khusus untuk mendukung RPJMN dan memberikan masukan ilmiah bagi penyusunan dokumen yang baru. Institute for Research and Empowerment (IRE), misalnya, mengembangkan studi untuk RPJMN 2020–2024 dari perspektif desa dan kawasan perdesaan. Studi ini memberikan panduan pembangunan desa yang terintegrasi dan berkelanjutan. Selama ini, sudut pandang yang dikembangkan adalah *pembangunanisme* yang terpusat dan seragam.⁵⁰ Dalam beberapa tingkatan, studi IRE yang mempromosikan peran lebih kuat bagi pemerintah desa dalam pembangunan ekonomi berdampak terhadap isu kejelasan batas desa yang pertama kali dimasukkan ke cetak biru.⁵¹



“Bersama KSI pula, IRE berefleksi bahwasanya sebuah proses advokasi kebijakan harus dilakukan dengan berkesinambungan berkat adanya sinergi dan kolaborasi kebijakan yang berbasis bukti.”
Dinda Ahlul Latifah, IRE

Studi lain yang dipertimbangkan dalam RPJMN bersumber dari SMERU dan PSHK. PSHK menggarisbawahi perlunya reformasi hukum terhadap regulasi yang tumpang-tindih, sementara SMERU berkontribusi melalui indeks pembangunan inklusif. Walaupun perihal kajian yang dipilih menjadi wewenang pembuat kebijakan, soal kualitas, Bappenas sangat mengapresiasi masukan-masukan dari PRI.

⁵⁰ Mahmud, “Naskah Sanding RPJMN 2020–2024,” IRE, 6 Maret 2020, <https://www.ireyogya.org/naskah-sanding-rpjm-2020-2024/>

⁵¹ Knowledge Sector Initiative, 2020, hlm. 40



"Kami menyampaikan hasil kajian kepada Kementerian Kesehatan, Asosiasi Dinas Kesehatan (Adinkes), dan Kantor Staf Presiden (KSP) dan mendapat respons yang sangat positif. Ini merupakan dampak dari perubahan kebijakan berbasis bukti dan peran KSI dalam mendukungnya."

Gaby Gabriela Langi, PUI-PT PPH PUK2IS Atma Jaya

Dalam rangka membantu pemerintah RI merespons pandemi Covid-19, mitra KSI banyak berperan dalam menghasilkan pengetahuan yang relevan serta berkolaborasi termasuk dengan pembuat kebijakan. Sebagai contoh, SMERU menyusun beberapa rekomendasi kebijakan untuk mengurangi dampak pandemi pada kelompok masyarakat miskin dan rentan. Sekretariat Nasional Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (Seknas FITRA) mengeluarkan rilis dan rekomendasi tentang penggunaan anggaran negara dalam situasi pandemi, sekaligus mengembangkan platform pemantauan tata kelola, kebijakan, dan anggaran. CSIS menerbitkan lebih dari 100 analisis kebijakan yang terkait dengan Covid-19. Melalui Disaster Management Research Unit, mereka berupaya memperkuat manajemen bencana di Indonesia.⁵²

⁵² "Kiprah Mitra KSI dalam Pandemi COVID-19," <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2129-kiprah-mitra-ksi-dalam-pandemi-covid-19>



“Dampak negatif dari pembelajaran jarak jauh lebih dirasakan oleh murid yang berada di luar Pulau Jawa. Bukan hanya karena kurangnya fasilitas telekomunikasi, mereka sulit belajar juga karena kurangnya kreativitas dan kemampuan para guru untuk beradaptasi.”

Athia Yumna, SMERU

Mitra KSI lainnya, yaitu AIDRAN, berperan penting dalam mengkaji dan memberikan rekomendasi kebijakan dengan mempertimbangkan perspektif GEDSI. Salah satu keluaran AIDRAN adalah pedoman pembelajaran daring bagi siswa penyandang disabilitas yang diadopsi Kemendikbud. Pedoman bertajuk *Panduan Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa dengan Disabilitas Netra dan Panduan Pembelajaran Daring bagi Mahasiswa dengan Hambatan Fisik* ini resmi diterbitkan pada situs web kementerian guna dijadikan rujukan pelaksanaan pembelajaran.



“Penelitian dilakukan untuk memahami bagaimana organisasi penyandang disabilitas dan penyandang disabilitas menjawab berbagai tantangan yang dihadapi di masa pandemi dan bagaimana organisasi penyandang disabilitas melakukan berbagai upaya untuk memastikan hak penyandang disabilitas terpenuhi.”

Slamet Thohari, AIDRAN

Hingga 2021, ke-16 PRI telah menyelesaikan 76 proyek penelitian yang memenuhi kriteria penelitian kebijakan berkualitas. Dari semua proyek penelitian tersebut, 72 studi memenuhi keenam kriteria kualitas yang disepakati, sementara empat studi lain memenuhi 4 dari 6 kriteria karena dipengaruhi faktor pandemi dan perubahan fokus kebijakan pemerintah.⁵³ Sebanyak 73 dari angka tersebut bertujuan memengaruhi kebijakan yang meningkatkan kelompok GEDSI. Semua proyek ini berhasil memengaruhi 33 perubahan kebijakan pemerintah di berbagai sektor (lihat Tabel 3), di mana 15 di antaranya mendorong perubahan kebijakan yang berdimensi inklusif.

Tabel 3. Perubahan Kebijakan yang Dipengaruhi Upaya PRI

No.	Perubahan Kebijakan	Lembaga	Tahun
1	Relaksasi moratorium untuk merekrut lebih banyak guru	Article 33 Indonesia	2018
2	Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 11 Tahun 2018	SurveyMETER	2018
3	Indeks Ekonomi Inklusif	SMERU	2018
4	Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 8 Tahun 2018	Akatiga	2018
5	Peraturan Menteri Tenaga Kerja No. 106 Tahun 2018 tentang Standar Kompetensi Nasional untuk Analisis Kebijakan	KPPOD	2018

⁵³ Laporan Tahunan KSI, 2022

6	Indeks Kualitas Kebijakan	KPPOD	2019
7	Undang-Undang No. 15 Tahun 2019	PSHK	2019
8	Rekomendasi reformasi regulasi pada RPJMN 2020–2024	PSHK	2020
9	Rekomendasi implementasi UU Desa pada RPJMN	IRE	2020
10	Kontribusi pada UU Cipta Kerja terkait lisensi bisnis di tingkat nasional dan subnasional	KPPOD	2020
11	Basis data Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) diadopsi oleh Kementerian Agama	PUSAD Paramadina	2020
12	Rekomendasi tentang kompetensi dasar dan inti untuk pendidikan dasar dan menengah diadopsi Kemendikbud	PPIM UIN	2020
13	Pembangunan inklusif diikuti sertakan dalam RPJMN sebagai prioritas	SMERU	2020
14	Rekomendasi tentang standar pendidikan dasar selama pandemi diadopsi Kemendikbud	SMERU	2020
15	Peraturan Bupati No. 3 Tahun 2020 mengenai penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) untuk basis data <i>stunting</i>	SurveyMETER	2021
16	Memengaruhi PP No. 5 Tahun 2021 tentang implementasi lisensi bisnis berbasis risiko	KPPOD	2021
17	Memengaruhi PP No. 6 Tahun 2021 tentang implementasi lisensi bisnis di daerah	KPPOD	2021
18	Memengaruhi PP No. 10 Tahun 2021 tentang pajak dan retribusi daerah untuk kemudahan dan layanan lisensi bisnis di daerah	KPPOD	2021
19	Memengaruhi alokasi dana desa Sindangagung senilai AU\$ 600 untuk tiga kelompok perempuan	IRE	2021
20	Memengaruhi alokasi dana desa Karangrejo senilai AU\$ 750 untuk lima perempuan dan kelompok petani rempah	IRE	2021
21	Memengaruhi Perda No. 3 Tahun 2021 tentang RPJMD Sleman	IRE	2021
22	Memengaruhi Perda No. 4 Tahun 2021 tentang RPJMD Sleman	IRE	2021
23	Situs PKMK dimasukkan ke situs pusat krisis Kementerian Kesehatan	PKMK	2021
24	Rekomendasi ELSAM diadopsi ke dalam Peraturan Presiden No. 53 Tahun 2021 tentang RANHAM	ELSAM	2021
25	Rekomendasi dan advokasi berujung pada penggunaan mekanisme Swakelola Tipe 3 di Sulawesi Selatan	Seknas FITRA	2021
26	Rekomendasi diadopsi BSNP ke dalam panduan belajar	PPIM	2021
27	Memengaruhi Petunjuk Teknis Manajemen Pelayanan Kesehatan Jiwa di Puskesmas di DKI Jakarta	PUI-PT PPH PUK2IS Atma Jaya	2021

28	Memengaruhi Regulasi Kepala Kabupaten Kebumen tentang penggunaan wajar tanah kas desa	Akatiga		2021
29	Memengaruhi Peraturan Desa Jatimulyo No. 3 Tahun 2021 tentang pemanfaatan tanah kas desa	Akatiga		2021
30	Memengaruhi alokasi dana Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta 2021 untuk mengimplementasikan kurikulum pendidikan usia dini	SurveyMETER		2021
31	Memengaruhi <i>standard operating procedure</i> tentang pelayanan kesehatan untuk penyandang disabilitas selama pandemi di Kabupaten Wajo, Sulawesi Selatan	Article Indonesia	33	2021
32	Memengaruhi Pedoman Pelaksanaan Program Keluarga Harapan 2021	SMERU		2021
33	Memengaruhi Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Sleman No. 188/031/DKS/I/2022 tentang peningkatan luasan evaluasi kesehatan dan upaya mengatasi demensia bagi warga lanjut usia	SurveyMETER		2022

Aspek keuangan menjadi salah satu faktor krusial dalam menunjang kinerja PRI, terutama mengingat pendanaan publik untuk penelitian di Indonesia relatif lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berpenghasilan menengah ke bawah lainnya.⁵⁴ Bantuan finansial serta pengaruh KSI dalam berjejaring diakui PRI sangat membantu mereka dalam menjalankan riset.⁵⁵

⁵⁴ Knowledge Sector Initiative, 2017, hlm. 5

⁵⁵ *Independent Strategic Review*, hlm. 12



"Asistensi KSI dan pendanaannya yang fleksibel membuat kami bisa lebih leluasa dalam merencanakan program sehingga bisa lebih tepat sasaran, baik di level daerah maupun nasional."
Husni Mubarak, PUSAD Paramadina

Data pada 2021 menunjukkan, sebelas PRI yang berpartisipasi dalam skema SPG sudah mengalami pertumbuhan pendapatan tahunan yang stabil dan positif dari sumber pendapatan dalam negeri/sendiri atau donor non-Department of Foreign Affairs and Trade (DFAT).⁵⁶ Mereka adalah Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat Universitas Islam Negeri (PPIM UIN) Syarif Hidayatullah, KPPOD, Pusat Studi Agama dan Demokrasi (PUSAD) Paramadina, Pusat Unggulan Ipteks Perguruan Tinggi Pusat Penelitian HIV AIDS Pusat Unggulan Kebijakan Kesehatan dan Inovasi Sosial (PUI-PT PPH PUK2IS) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, CWI, Article 33 Indonesia, Akatiga, IRE, SMERU, Sajogyo Institute, dan Seknas FITRA. Melalui dukungan tersebut, empat PRI berhasil meningkatkan kapasitas SDM serta kemampuan menyusun proposal dana hibah dan materi pelatihan. Pendapatan dengan total AU\$ 670 ribu pada 2021 diperoleh dari donor internasional (PPIM UIN dan CWI), donor domestik (PPIM UIN dan Sajogyo Institute), serta sumbangan pribadi (IRE).⁵⁷

Catatan lain adalah seputar pandemi Covid-19 yang turut mengubah prioritas pemerintah. Konsekuensinya, terjadi restrukturisasi anggaran di semua K/L. Berdasarkan Perpres Nomor 54 Tahun 2020, anggaran Kemenristekdikti disesuaikan hingga Rp 40 triliun, sehingga menyisakan Rp 2 triliun saja.⁵⁸ Dampaknya, terdapat efisiensi anggaran riset yang berisiko terhadap perkembangan lembaga penelitian.⁵⁹ Meski demikian, PRI mampu beradaptasi dan

⁵⁶ Laporan Tahunan KSI, 2021, hlm. 32

⁵⁷ Laporan Tengah Tahun KSI, 2021, hlm. 16

⁵⁸ Kementerian Keuangan, Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2020, <https://www.kemenkeu.go.id/media/14851/2-lampiran.pdf>

⁵⁹ Knowledge Sector Initiative, 2021, hlm. 73

menemukan peluang sambil terus meningkatkan profil, jaringan, dan pendanaannya.⁶⁰ Bahkan, beberapa PRI aktif terlibat dalam memberikan rekomendasi seputar penanganan pandemi sesuai dengan disiplin ilmu masing-masing.

Memastikan Keberlanjutan PRI

Dukungan KSI telah membantu PRI dalam mengidentifikasi dan mengimplementasikan strategi yang tepat dalam manajemen organisasi dan riset. Pengalaman dalam perumusan kebijakan juga menumbuhkan kesadaran akan pentingnya mengonsolidasikan kekuatan dan membuat PRI bekerja secara terkoordinasi sebagai aliansi. Adapun beberapa pembelajaran yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut.

1. Keberadaan dana hibah penelitian dari donor masih dibutuhkan

Walaupun secara umum PRI sudah berhasil memperoleh pendapatan dari hasil diversifikasi bisnis, potensi penghasilan dari pendanaan domestik tetap minim, sehingga ketergantungan terhadap donor tetap tinggi.⁶¹ Selain karena jumlah pendanaan penelitian pemerintah yang masih belum mencukupi, tantangan ini dipengaruhi rendahnya minat swasta untuk bekerja sama melakukan penelitian dengan PRI. Penyebabnya, selain faktor minimnya pengalaman kerja sama, khususnya dalam penelitian ilmu sosial, saat ini belum tersedia skema insentif yang memadai bagi pihak swasta untuk menjalankan kolaborasi tersebut.⁶²

2. Perlunya menumbuhkan permintaan terhadap riset sosial

Negara-negara dengan ekonomi berbasis pengetahuan yang sudah matang memperlakukan ilmu sosial sejajar dengan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, rekayasa, matematika, dan medis. Di Asia, negara-negara maju (seperti Jepang dan Korea Selatan) dan negara-negara dengan status ekonomi yang setara dengan Indonesia (Vietnam dan Thailand) telah memberikan pendanaan memadai bagi riset ilmu sosial dan humaniora.⁶³ Hal ini belum terjadi di Indonesia sehingga secara otomatis akan menyulitkan PRI dalam memperoleh pendapatan dari sektor swasta, kecuali dari industri besar atau industri dengan regulasi ketat. Ketika kebijakan tertentu sangat berkaitan dengan kepentingan ekonomi (contoh pengendalian tembakau), industri rokok dan petani tembakau akan mengupayakan dana, koneksi politik, dan kapasitas perusahaan untuk memastikan kebijakan sejalan dengan agenda mereka.⁶⁴ Dalam advokasi tersebut, sering kali mereka menyalurkan dana kepada PRI untuk menyusun kajian.

⁶⁰ Knowledge Sector Initiative, 2021, hlm. 21

⁶¹ Ibid, hlm. 16

⁶² Knowledge Sector Initiative, 2019, hlm. 8

⁶³ *Mendorong Perbaikan Ekosistem Riset dan Inovasi Indonesia*, hlm. 6

⁶⁴ *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle*, hlm. 16

Menindaklanjuti dua hal di atas, rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut.

1. Mendorong adanya dana hibah penelitian dari donor

Pengusung visi ekosistem pengetahuan perlu meyakinkan donor internasional agar menyiapkan dana hibah riset kebijakan yang bersifat kontrak tahun jamak. Mekanisme tersebut akan memberikan stabilitas bagi PRI, sehingga mereka dapat melakukan perencanaan perekrutan tenaga riset ahli dan pengembangan sistem manajerial yang lebih baik untuk menghasilkan penelitian yang bermutu. Keberhasilan skema ini akan menjadi insentif bagi pemerintah untuk mengalokasikan pos-pos anggaran yang dianggap kurang efektif kepada para aktor pendukung perumusan kebijakan berbasis bukti.

2. Mendorong keberadaan regulasi yang mewajibkan bisnis melakukan kajian sosial

Pengusung visi ekosistem pengetahuan perlu mempromosikan pentingnya menjadikan kajian ilmu sosial sebagai syarat kepatuhan dalam dunia bisnis, baik sehubungan dengan perizinan maupun evaluasi. Jika kajian sosial menjadi prasyarat, seperti analisis mengenai dampak lingkungan (amdal), secara otomatis akan terjadi peningkatan permintaan terhadap jasa PRI. Hal tersebut akan memastikan keberlanjutan pendanaan PRI, dengan atau tanpa adanya pendanaan yang bersifat hibah, sekaligus mendorong PRI untuk makin profesional.



Penutup

Dalam konteks pembangunan negara, satu dekade merupakan sebuah periode yang singkat. Rentang periode ini makin sempit jika mempertimbangkan kontestasi politik yang digelar lima tahun sekali, baik di tingkat nasional maupun daerah. Situasi tersebut menyebabkan berbagai jenis inisiatif atau upaya perubahan berada pada posisi riskan. Tidak jarang prioritas kepala negara atau kepala daerah bertolak belakang dengan pendahulunya sehingga menihilkan segala bentuk progres yang sudah terjadi.

Mendasarkan fakta di atas, desain awal KSI sudah menggarisbawahi bahwa program akan berlangsung dalam dua fase. KSI tidak dikonsepsikan sebagai sebuah program konvensional. Bahkan, label inovatif sering menjadi penggambaran para pemangku kepentingan ketika memberikan deskripsi tentang KSI. Hanya dalam kurun empat tahun (Mei 2013–Juni 2017), KSI berhasil meningkatkan kapasitas riset dan manajemen 16 PRI sekaligus beberapa lembaga pemerintah yang berperan dalam perumusan kebijakan.

Keberhasilan pada Fase 1 turut dipengaruhi iklim pemerintahan sejak Joko Widodo (Jokowi) menjabat sebagai Presiden RI pada 2014. Pemerintahan era Jokowi mulai memberikan penekanan terhadap pentingnya data, informasi, dan analisis. Penggunaan telepon seluler (ponsel) pintar, penetrasi internet, dan euforia media sosial menjadi faktor-faktor lain yang menumbuhkan kesadaran masyarakat akan urgensi transparansi birokrasi, khususnya dalam perumusan kebijakan.

Terlepas dari segala pencapaian pada Fase 1, KSI dinilai perlu melakukan perubahan-perubahan ketika memasuki Fase 2. Secara spesifik, tidak semua kegiatan program dapat didesain secara tegas dari awal hingga akhir; kegiatan harus bersifat fleksibel dan lincah dalam menangkap peluang. Artinya, tim KSI sudah dipersiapkan untuk menghadapi kemungkinan jalan buntu dan segera mengalihkan fokus ketika dirasa perlu.

Melihat ke belakang, strategi ini sangat relevan dan akurat dalam mencerminkan kondisi riil. Belum pulih dari krisis keuangan global pada 2018, perekonomian dunia kembali mengalami pertumbuhan negatif sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Proses advokasi yang sejatinya mengandalkan relasi antarpersonal menjadi terhambat dan secara tidak langsung memengaruhi perencanaan yang telah disusun. Meski demikian, memasuki 2022, terlihat

bahwa perubahan pada upaya produksi pengetahuan berkualitas sudah terjadi, khususnya jika dibandingkan dengan periode sebelum 2013.

Meninggalkan Warisan

Sejak awal, KSI menyadari bahwa upaya mendorong produksi riset tidak mudah. Visi KSI tidak hanya mendorong kuantitas, tetapi juga keberlanjutan dan kualitas dari lembaga riset lokal. Karena itu, penting untuk terus memberikan dorongan kepada pemerintah dalam menjamin skema insentif yang lebih atraktif bagi peneliti, baik dari kalangan pemerintah, swasta, maupun akademisi.

Adapun masalah keterbatasan sumber daya riset hingga budaya riset jangka pendek dari lembaga peneliti lokal menjadi bukti nyata bahwa perubahan sistemis perlu terjadi. Selama 10 tahun terakhir, beberapa regulasi baru atau perubahan telah terbit dengan tujuan mempermudah kegiatan penelitian di Indonesia. Selain itu, bukti-bukti mengenai perkembangan PRI, baik dari segi kapasitas teknis maupun finansial, menjadi modal berharga bagi keberlanjutan produksi pengetahuan yang berkualitas. Harapannya, kemajuan yang ada terus dikaryakan dengan baik, sehingga cita-cita bangsa seperti tercantum pada Visi Indonesia 2045 akan segera terwujud.



Referensi

- Huda, N., Pawennei, I., Ratri, A., & Taylor, V. (2020). *Mendorong Perbaikan Ekosistem Riset dan Inovasi Indonesia: Pembelajaran Internasional dan Masukan Pemangku Kepentingan*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Humas. (2015, Mei 19). "Sudah Punya 700 Ribu, Indonesia Masih Butuh 120 Ribu Insinyur". Diambil kembali dari Sekretariat Kabinet Republik Indonesia: <https://setkab.go.id/sudah-punya-700-ribu-indonesia-masih-butuh-120-ribu-insinyur/>.
- Riana, F. (2022, Januari 4). "Kepala BRIN Ungkap 2 Masalah Fundamental Riset di Indonesia". Diambil kembali dari *Tempo.co*: <https://nasional.tempo.co/read/1546480/kepala-brin-ungkap-2-masalah-fundamental-riset-di-indonesia>.
- Yusadiredja, I.N. (2020). *Evaluasi Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Disabilitas, dan Inklusi Sosial pada Riset Universitas Melalui Hibah Penelitian Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional 2017–2020*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- KSI. (2017). *KSI Phase 2 Guiding Strategy V1.2*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Faiz, A. (2018, April 9). "Jokowi Pertanyakan Hasil Riset dengan Anggaran Rp 24,9 Triliun". Diambil kembali dari *Tempo.co*: <https://bisnis.tempo.co/read/1077794/jokowi-pertanyakan-hasil-riset-dengan-anggaran-rp-249-triliun/full&view=ok>.
- Knowledge Sector Initiative. (2020). *Project Completion Report (draft)*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Blomkamp, E.; Sholikin, M.N.; Nursyamsi, F.; Lewis, J.M.; & Toumbourou, T. (2018). *Understanding Policymaking in Indonesia: In Search of a Policy Cycle*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Wardhani, B.R.; & Royono, R. (t.thn.). "Aksi Kolektif Pengarusutamaan GEDSI dalam Penelitian". Knowledge Sector Initiative.

- Knowledge Sector Initiative. (2017). *The Knowledge Sector Initiative Phase 1 Achievements*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Knowledge Sector Initiative. (2020, September 10). "Kiprah Mitra KSI dalam Pandemi COVID-19". Diambil kembali dari KSI Indonesia: <https://www.ksi-indonesia.org/id/wawasan/detail/2129-kiprah-mitra-ksi-dalam-pandemi-covid-19>.
- Knowledge Sector Initiative. (2021). *Six-Monthly Report January–June 2021*. Jakarta: Knowledge Sector Initiative.
- Hertz, J.C.; Brinkerhoff, D.W.; Bush, R.; & Karetji, P. (2020). *Knowledge Systems: Evidence to Policy Concepts in Practice*. RTI Press Publication.
- Think Tank Initiative Insight. (2019). "Research quality for policy engagement". <http://www.thinktankinitiative.org/content/tti-insights-research-quality-policy-engagement>.

